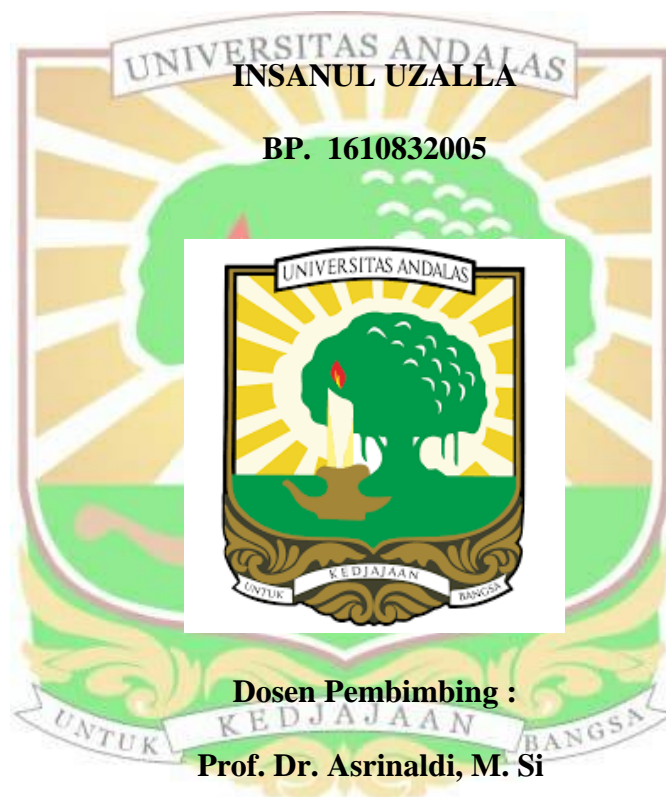


**PELAKSANAAN JARING ASPIRASI MELALUI KEGIATAN RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas*

Oleh :



Mhd Fajri, S.IP, MA

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

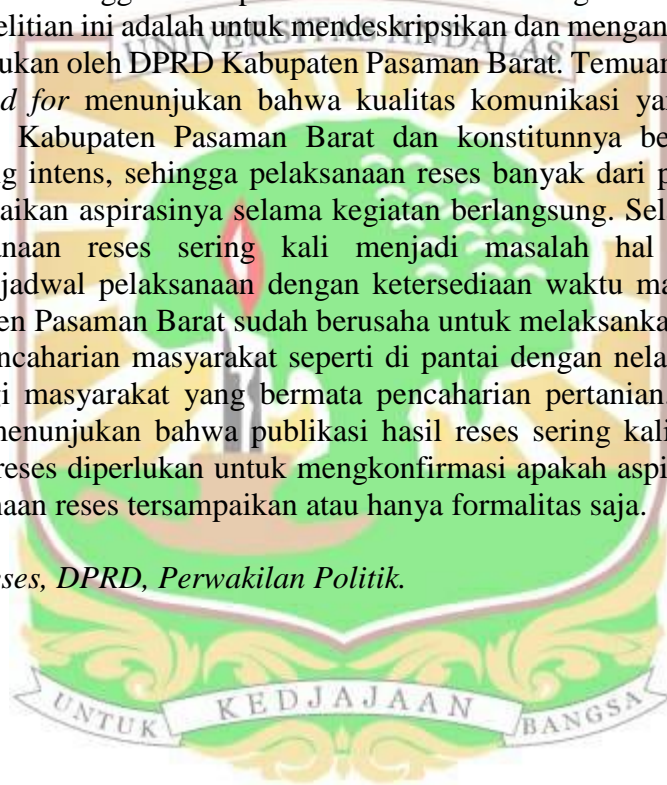
PADANG

2023

ABSTRAK

Pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat diwarnai dengan berbagai macam kendala-kendala yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan reses itu sendiri. Reses yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat menjadi terkendala dikarenakan antusiasme masyarakat tidak diimbangi dengan partisipasi yang tinggi pula. Komunikasi menjadi kendala utama yang mengganggu kelancaran berjalannya kegiatan reses tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perwakilan politik dari Hannah Pitkin dengan menggunakan aspek *stand for* dan *act for* sebagai pisau analisis unruk menjelaskan permasalahan penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Temuan penelitian dilihat dari aspek *stand for* menunjukkan bahwa kualitas komunikasi yang terjalin antara anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan konstitunnya belum menunjukkan komunikasi yang intens, sehingga pelaksanaan reses banyak dari peserta yang tidak dapat menyampaikan aspirasinya selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penetapan jadwal pelaksanaan reses sering kali menjadi masalah hal ini dikarenakan kediaksesuaian jadwal pelaksanaan dengan ketersediaan waktu masyarakat. Namun DPRD Kabupaten Pasaman Barat sudah berusaha untuk melaksanakan reses di tempat-tempat mata pencaharian masyarakat seperti di pantai dengan nelayan dan di kebun atau sawah bagi masyarakat yang bermata pencaharian pertanian. Jika dilihat dari aspek *act for* menunjukkan bahwa publikasi hasil reses sering kali tidak dilakukan. Publikasi hasil reses diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah aspirasi yang dijaring selama pelaksanaan reses tersampaikan atau hanya formalitas saja.

Kata Kunci : Reses, DPRD, Perwakilan Politik.



ABSTRACT

The implementation of the recess for DPRD members in West Pasaman Regency was marked by various kinds of obstacles that could interfere with the smooth running of the recess itself. The recess which was carried out with the aim of capturing people's aspirations became constrained because the enthusiasm of the people was not matched by high participation either. Communication is the main obstacle that interferes with the smooth running of the recess activities. This study uses the theory of political representation from Hannah Pitkin by using stand for and act for aspects as an analytical knife to explain research problems. The research method uses a qualitative approach with the case study method. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the recess carried out by the DPRD of West Pasaman Regency. The research findings seen from the stand for aspect show that the quality of communication that exists between West Pasaman Regency DPRD members and their constituents has not shown intense communication, so that during the recess many participants were unable to convey their aspirations during the activity. In addition, the determination of the recess implementation schedule is often a problem, this is due to the discrepancy between the implementation schedule and the availability of community time. However, the DPRD of West Pasaman Regency has tried to carry out recess in places of community livelihoods such as on the beach with fishermen and in gardens or rice fields for people with agricultural livelihoods. When viewed from the act for aspect, it shows that the publication of recess results is often not carried out. Publication of the results of the recess is needed to confirm whether the aspirations captured during the recess were conveyed or were they just a formality.

Keywords: Recess, DPRD, Political Representative.

